

TANTANGAN AKSES PENDIDIKAN DAN HARAPAN MASYARAKAT DI DESA BANTAN AIR, KECAMATAN BANTAN, KABUPATEN BENGKALIS

Fania Oktasyah Putri¹, Natasa Ria², Mutia Salsabila³, Sahrul Amanda⁴, Fikri
Maulana⁵, Riana Stefani Sinaga⁶

fanialoktasyah1462@student.unri.ac.id¹, natasa.ria4773@student.unri.ac.id²,
mutiasalsabila7333@student.unri.ac.id³, sahrul.amanda3489@student.unri.ac.id⁴,
fikri.maulana6004@student.unri.ac.id⁵, riana.stefani2127@student.unri.ac.id⁶

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan akses pendidikan serta menggali harapan masyarakat terhadap pengembangan pendidikan di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mengakses pendidikan meliputi infrastruktur jalan yang rusak, ketiadaan transportasi umum, dan keterbatasan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Meskipun begitu, masyarakat memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan anak. Diharapkan pemerintah dapat memberikan intervensi melalui perbaikan infrastruktur dan penyediaan dukungan pendidikan berbasis kebutuhan desa.

Kata Kunci: Akses Pendidikan, Infrastruktur, Transportasi, Fasilitas Sekolah, Harapan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to identify the challenges in accessing education and to explore the community's expectations for educational development in Bantan Air Village, Bantan District, Bengkalis Regency. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, field observations, and documentation. The results of the study indicate that the main challenges in accessing education include damaged road infrastructure, the absence of public transportation, and limited school facilities such as classrooms, laboratories, and libraries. Nevertheless, the community shows a strong commitment to their children's education. It is hoped that the government will provide interventions through infrastructure improvements and the provision of educational support based on the village's specific needs.

Keywords: Educational Access, Infrastructure, Transportation, School Facilities, Community Expectations.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan berkeadaban. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Namun demikian, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi realitas yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di pedesaan yang jauh dari pusat kota.

Wilayah-wilayah seperti Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis menjadi representasi dari daerah-daerah yang menghadapi tantangan serius dalam menyediakan akses pendidikan yang layak. Meskipun desa ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 6.550 jiwa (1.732 KK) dan terdiri atas delapan dusun, fasilitas pendidikan dan aksesibilitasnya belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara merata.

Kondisi geografis dan infrastruktur desa menjadi salah satu penghambat utama. Jalan penghubung antar desa seperti jalur menuju Desa Muntai Barat mengalami kerusakan parah, bahkan setelah dilakukan penimbunan batu krikil. Lubang-lubang besar yang tergenang air saat hujan menjadi ancaman bagi keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah yang harus berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor ke sekolah setiap hari. Belum lagi ketiadaan transportasi umum seperti bus atau ojek daring menyebabkan mobilitas siswa sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi, yang tentu tidak dimiliki oleh semua keluarga.

Secara kelembagaan, Desa Bantan Air telah memiliki beberapa satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga Madrasah Aliyah swasta. Meski demikian, fasilitas yang dimiliki masih sangat terbatas, baik dari segi sarana belajar seperti laboratorium, komputer, dan perpustakaan, maupun kenyamanan ruang kelas. Dalam wawancara dengan guru dan siswa, terungkap bahwa banyak ruang kelas yang sudah tua, buku pelajaran tidak memadai, dan perangkat praktik seperti komputer masih sangat minim, sehingga menghambat proses belajar-mengajar.

Situasi ini berbanding lurus dengan temuan sejumlah penelitian sebelumnya. Amir, Rahmawati, dan Sudrajat (2020) mengungkapkan bahwa tantangan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya peran pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pendidikan masyarakat. Baihaki et al. (2024) menyoroti bahwa transportasi dan infrastruktur jalan yang buruk di desa-desa menyebabkan banyak siswa kesulitan menjangkau sekolah dan berdampak langsung pada angka partisipasi sekolah. Hal serupa juga disampaikan oleh Shakira et al. (2024) bahwa jalan rusak dan ketiadaan kendaraan umum menjadi kendala utama dalam pemerataan pendidikan.

Ketimpangan pendidikan juga diperparah oleh ketiadaan sekolah menengah atas negeri dan perguruan tinggi di desa ini. Meskipun terdapat Madrasah Aliyah swasta, banyak siswa harus ke luar daerah seperti ke Kota Bengkalis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang tentu membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Hal ini menjadi beban bagi keluarga yang ekonominya terbatas, dan menyebabkan sebagian siswa memilih berhenti sekolah setelah jenjang menengah pertama.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Bantan Air tetap menunjukkan semangat yang tinggi terhadap pendidikan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di desa mereka. Aspirasi yang muncul antara lain berupa permintaan perbaikan jalan, penyediaan beasiswa untuk anak-anak berprestasi, peningkatan fasilitas sekolah, serta kehadiran transportasi umum yang dapat membantu mobilitas siswa. Beberapa program sudah mulai direncanakan, seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bantan, namun pelaksanaannya masih perlu dipercepat dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif tantangan akses pendidikan yang dihadapi masyarakat Desa Bantan Air dan mengeksplorasi harapan mereka terhadap dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi akses pendidikan serta harapan masyarakat di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan pendidikan dari sudut pandang masyarakat secara langsung, dengan melihat pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terhadap proses pendidikan di wilayahnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara kontekstual, fleksibel, dan mendalam (Creswell, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan memberikan gambaran faktual dan sistematis tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan utama yang menggambarkan kondisi riil tantangan akses pendidikan dan harapan masyarakat di Desa Bantan Air. Hasil ini dikategorikan dalam empat aspek utama, yaitu: kondisi fasilitas pendidikan, aksesibilitas jalan dan transportasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan harapan masyarakat terhadap perbaikan layanan pendidikan.

Kondisi Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan kunci (guru, orang tua, dan siswa), diperoleh data sebagai berikut yang menunjukkan keterbatasan fasilitas dan hambatan belajar:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara tentang Fasilitas dan Akses Pendidikan

Informan	Subfokus	Data Wawancara	Rekapitulasi
1. Apak I.G (Guru) 2. Ibu S.W (Masyarakat desa) 3. Murid A (Siswa)	Tantangan akses pendidikan	1. Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kondisi fasilitas pendidikan di desa Bantan sari? Apakah sudah cukup memadai apa belum? 2. Menurut bapak/ibu Apakah keterbatasan fasilitas disini itu sangat memengaruhi semangat belajar siswa yang ada disini? 3. Menurut bapak/ibu Bagaimana kualitas pendidikan di desa ini? 4. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam mengantar anak kesekolah? 5. Menurut kamu sebagai siswa Bagaimana si kondisi jalan menuju sekolah? Apakah sering terjadi kendala akibat cuaca atau infrastruktur yang buruk? 6. Menurut kamu sebagai siswa apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses belajar disini?	1. Kondisi fasilitas pendidikan di desa bantan sari masih jauh dari memadai kami kekurangan ruang kelas yang layak, perpustakaan dengan koleksi buku yang minim, serta fasilitas penunjang belajar seperti laboratorium dan peralatan praktik yang terbatas. Beberapa bangunan sekolah juga sudah tua dan memerlukan perbaikan. 2. Ya tentunya keterbatasan fasilitas di desa bantan sari ini itu memengaruhi semangat belajar siswa karna seperti yang kita lihat ruang kelas yang kurang nyaman ini juga memengaruhi semangat belajar siswa tersebut. 3. Menurut saya, kualitas pendidikannya lumayan, tapi saya berharap anak anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi

Hasil wawancara dengan informan dari kalangan guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan di Desa Bantan Air masih tergolong sangat minim dan belum memenuhi standar kenyamanan dan kelengkapan sarana belajar. Informan guru (Bapak I.G) menyampaikan bahwa sekolah kekurangan ruang kelas yang layak, perpustakaan tidak memiliki koleksi buku yang cukup, dan fasilitas laboratorium serta perangkat komputer sangat terbatas. Ia menambahkan bahwa banyak ruang kelas sudah tua dan rusak sehingga membahayakan keselamatan siswa dan mengurangi efektivitas belajar.

Hal ini dikonfirmasi oleh siswa (Murid A) yang mengaku kesulitan belajar karena keterbatasan buku pelajaran dan sarana praktik. Bahkan untuk pelajaran berbasis teknologi, jumlah komputer yang tersedia sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah siswa, membuat proses belajar menjadi tidak merata dan sering bergantian. Kondisi ini selaras dengan temuan Annisa et al. (2024) yang menekankan bahwa ketidakmerataan fasilitas fisik sekolah di wilayah pedesaan menjadi faktor penghambat kualitas pendidikan.

Selain itu, dari observasi langsung di lapangan, terlihat bahwa beberapa bangunan sekolah mengalami kerusakan struktural, cat mengelupas, lantai berlubang, dan pencahayaan ruang kelas yang kurang memadai. Ini menyebabkan suasana belajar menjadi tidak kondusif dan kurang memotivasi siswa untuk aktif belajar.

Aksesibilitas Jalan dan Transportasi

Hasil observasi di lapangan memperkuat temuan wawancara. Tabel berikut merangkum kondisi fisik dan sosial ekonomi yang menjadi tantangan utama dalam akses pendidikan:

Tabel 2. Hasil Observasi Kondisi Akses dan Transportasi Pendidikan di Desa Bantan Air

Sub Fokus	Objek Observasi	Rekapitulasi Analisis Data Observasi
Lokasi Desa	Alamat Desa Bantan Air	Desa Bantan Air terletak di kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Yang mempunyai jumlah penduduk 6.550 jiwa atau 1.732 KK dengan luas daerah 7073 H, yang terdiri dari 8 dusun.
Akses Jalan	Kondisi Jalan	Kondisi Jalan Desa Bantan Air menuju ke Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Bengkalis kondisinya sangat memprihatinkan. Meski beberapa waktu lalu, sempat dilakukan penimbunan dengan batu krikil sepanjang lebih kurang 11 kilometer, namun kondisinya saat ini sulit dilalui kendaraan roda dua dan empat. Ditambah lagi, saat air hujan mengguyur wilayah tersebut, sehingga genangan air menutupi lobang yang menganga di sepanjang jalan. Kondisi juga membuat kendaraan yang melintas tidak bisa memacu kendaraan dan harus waspada terhadap jebakan lobang yang cukup dalam.
Fasilitas Transportasi	Ketersediaan transportasi umum	Tidak ada transportasi umum seperti bus, angkot, ojek online (gojek atau maxim) yang masuk ke Desa Bantan sari. Warga desa hanya mengandalkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor untuk mengantar anak-anak sekolah. Bagi keluarga yang tidak memiliki kendaraan, akses ke sekolah menjadi sangat sulit, terutama
Jarak Tempuh Sekolah	Lama Perjalanan Siswa ke Sekolah	Jarak tempuh perjalanan siswa ke sekolah di perkiraan 1 sampai 3 kilometer. Waktu

		tempuh isa lebih lama saat hujan karena kondisi jalan yang rusak parah.
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	Pekerjaan dan Daya Dukung Pendidikan	Mayoritas penduduk Desa Bantan Sari bekerja di sektor pertanian, khususnya budidaya jahe dan produksi kerupuk leko. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, BUMDes setempat telah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) dalam program pendampingan UMKM. Kegiatan ini meliputi pelatihan digital marketing dan peningkatan kualitas pengemasan produk, seperti bubuk jahe dan kerupuk leko, guna memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Desa Bantan Sari menunjukkan komitmen melalui program Edukasi Duta Literasi di SD Negeri 27 Bantan.
Harapan Masyarakat	Aspirasi terhadap Pendidikan yang Lebih Baik	Masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi jalan, Mereka juga menginginkan adanya program bantuan beasiswa dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, agar dapat menempuh pendidikan secara layak dan setara dengan daerah lain.
Peran Pemerintah	Dukungan dan Program Pendidikan	pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Musrenbang Kecamatan Bantan telah menjadikan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan.
		Perbaikan dan pembangunan jalan yang lebih baik diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat dan siswa menuju sekolah. Pembangunan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara desa yang memiliki infrastruktur memadai dan desa yang masih tertinggal dalam hal aksesibilitas.

Kondisi infrastruktur jalan menuju sekolah menjadi salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini. Berdasarkan data observasi dan wawancara, jalan penghubung antar dusun dan antara Desa Bantan Air ke desa lain seperti Desa Muntai Barat dalam kondisi rusak parah. Meski pernah dilakukan penimbunan menggunakan batu krikil sepanjang ± 11 km, jalan tetap tidak layak dilalui, terutama saat musim hujan. Lubang- lubang besar yang tergenang air menjadi ancaman keselamatan bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasinya dengan berjalan kaki atau sepeda motor.

Salah satu orang tua siswa (Ibu S.W) mengeluhkan bahwa jarak rumah ke sekolah cukup jauh dan tidak adanya kendaraan umum membuat ia kesulitan mengantar anaknya ke sekolah. Siswa pun mengaku sering terlambat karena jalan becek dan licin saat hujan. Hal ini didukung oleh Baihaki et al. (2024) dan Shakira et al. (2024) yang menyoroti bahwa buruknya akses transportasi di daerah pedesaan Indonesia menjadi penyebab utama ketimpangan dan rendahnya partisipasi sekolah.

Desa Bantan Air juga tidak memiliki fasilitas transportasi umum seperti bus, angkutan pedesaan, maupun ojek daring. Warga hanya mengandalkan kendaraan pribadi, yang tentunya tidak semua keluarga memilikinya. Ketiadaan transportasi ini memperparah beban aksesibilitas pendidikan, khususnya bagi keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Gambar berikut memperlihatkan kondisi jalan utama yang dilalui siswa setiap hari menuju sekolah, terutama saat musim hujan:



Gambar. 1 Jalan Penghubung Desa Bantan Air yang Rusak Parah saat Musim Hujan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Mayoritas warga Desa Bantan Air bekerja sebagai petani dan pelaku UMKM kecil, seperti pengolahan jahe dan produksi kerupuk leko. Berdasarkan dokumentasi dari data observasi, program peningkatan kapasitas masyarakat telah dilakukan melalui pelatihan bersama Politeknik Bengkalis dalam bidang digital marketing dan pengemasan produk.

Meskipun ekonomi desa masih terbatas, masyarakat menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Ini ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam program "Duta Literasi" yang berlangsung di SDN 27 Bantan dan keikutsertaan mereka dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun demikian, keterbatasan pendapatan tetap menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena banyak siswa harus bersekolah ke luar daerah, misalnya ke Kota Bengkalis.

Hal ini sesuai dengan hasil studi Agustina & Salam (2019) dan Mustawaniyah (2023) yang mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli terhadap kebutuhan pendidikan.

Harapan dan Aspirasi Masyarakat

Warga desa memiliki harapan besar terhadap perubahan dalam bidang pendidikan. Harapan tersebut terekam dalam wawancara yang menyebutkan beberapa kebutuhan prioritas sebagai berikut:

1. Perbaikan total jalan penghubung desa untuk memudahkan mobilitas siswa dan guru.
2. Penyediaan kendaraan operasional atau subsidi transportasi bagi siswa.
3. Penambahan dan perbaikan ruang kelas, serta ketersediaan perpustakaan dan laboratorium yang layak.
4. Bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
5. Ketersediaan guru yang kompeten dan distribusi tenaga pengajar yang merata.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Musrenbang Kecamatan Bantan, telah merancang prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan fasilitas pendidikan. Namun, implementasi di lapangan masih dinilai lambat dan belum menyentuh langsung

kebutuhan utama warga. Menurut informan, ada kekhawatiran bahwa jika tidak segera ditindaklanjuti, anak-anak mereka akan semakin tertinggal secara pendidikan dibanding daerah lain yang lebih maju.

Harapan-harapan ini menunjukkan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat pinggiran. Sejalan dengan Rasjid et al. (2024) dan Kapile & Aras (2019), peran serta aktif masyarakat serta tanggapnya pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi lokal merupakan kunci dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah 3T.

Pembahasan

Ketimpangan Akses Pendidikan: Cermin Ketidakadilan Struktural

Temuan utama dalam penelitian ini menyoroti akses pendidikan di Desa Bantan Air sebagai cerminan dari ketimpangan struktural antara wilayah pusat dan perifer. Kerusakan infrastruktur jalan, tidak tersedianya transportasi umum, dan keterbatasan sarana pendidikan merupakan konsekuensi dari absennya keberpihakan anggaran dan tata kelola pembangunan yang partisipatif. Amir et al. (2020) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan di daerah terpencil menderita karena lemahnya intervensi sistemik pemerintah, khususnya dalam aspek anggaran berbasis keadilan spasial.

Kondisi geografis yang sulit seharusnya menjadi prioritas pembangunan afirmatif. Namun dalam praktiknya, seperti ditunjukkan oleh Shakira et al. (2024), wilayah-wilayah seperti Bantan Air justru mengalami marginalisasi kebijakan. Dampaknya, anak-anak desa harus berjalan kaki di jalan rusak selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan hak dasarnya: belajar. Ketika pendidikan menjadi mewah bagi sebagian masyarakat desa, ini menandakan bahwa amanat konstitusi (UUD 1945 pasal 31) belum dijalankan secara adil dan merata.

Krisis Fasilitas dan Ketimpangan Mutu Pendidikan

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya menurunkan kenyamanan belajar, tetapi juga menciptakan "ketimpangan mutu pendidikan" yang sistemik. Ruang kelas yang rusak, tidak adanya laboratorium, serta komputer yang minim membuat anak-anak Desa Bantan Air tidak mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan anak-anak di kota. Padahal, Annisa et al. (2024) menegaskan bahwa kualitas fasilitas sekolah memiliki korelasi langsung dengan pencapaian akademik siswa.

Fasilitas yang buruk bukan hanya memperburuk suasana belajar, tetapi juga menghambat tumbuhnya kompetensi abad 21, seperti keterampilan teknologi, literasi digital, dan pemecahan masalah. Fardila et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya pemerataan sarana pendidikan berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks Bantan Air, kebutuhan itu sangat mendesak, namun belum direspons secara struktural oleh kebijakan daerah.

Determinan Sosial Ekonomi: Pendidikan Terperangkap dalam Kemiskinan Struktural

Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat Desa Bantan Air sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan UMKM, dengan penghasilan rendah dan fluktuatif. Situasi ini mengukuhkan argumen Luthfia et al. (2023) bahwa pendidikan di wilayah 3T tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi lokal. Ketika orang tua harus memilih antara membeli beras atau membayar ongkos sekolah anaknya, maka pendidikan menjadi sekunder.

Ironisnya, pendidikan justru merupakan jalan keluar dari kemiskinan. Namun dalam realitas seperti di Bantan Air, pendidikan tidak cukup terjangkau dan tidak cukup relevan. Agustina dan Salam (2019) menyebut fenomena ini sebagai "lingkaran setan pendidikan", di mana kemiskinan menghambat pendidikan, dan pendidikan yang buruk melanggengkan kemiskinan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya optimisme sosial. Keterlibatan masyarakat dalam program “Duta Literasi” dan pelatihan UMKM menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki daya adaptasi dan aspirasi kuat terhadap perubahan. Ini mendukung temuan Kapile dan Aras (2019) yang menekankan bahwa partisipasi lokal adalah modal sosial penting untuk memperbaiki sistem pendidikan desa.

Kesenjangan Implementasi Kebijakan: Kritik terhadap Desentralisasi

Desentralisasi pendidikan yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses ternyata belum efektif di Bantan Air. Musrenbang sebagai forum partisipatif belum menghasilkan kebijakan responsif terhadap realitas lokal. Mustawaniyah (2023) menilai bahwa salah satu kelemahan utama desentralisasi adalah rendahnya kapasitas perencanaan dan eksekusi di tingkat daerah.

Selain itu, Rahma dan Kartiasih (2024) menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan fisik dan penguatan teknologi informasi dalam pendidikan. Namun di lapangan, internet lambat, perangkat digital tidak tersedia, dan literasi digital masih rendah. Hal ini menjadikan desa semakin tertinggal dari arus transformasi pendidikan digitalnasional, terutama sejak pandemi COVID-19.

Ketimpangan semacam ini berisiko memperlebar digital divide dan menambah "jarak pengetahuan" antarwilayah. Dalam jangka panjang, anak-anak desa akan mengalami ketertinggalan kompetensi yang tak mudah dikejar, sebagaimana dikhawatirkan oleh Radja et al. (2023) dalam kajiannya tentang kualitas pendidikan di pedesaan.

Jalan ke Depan: Desain Ulang Kebijakan Pendidikan Desa

Temuan penelitian ini memberi pesan penting: kebijakan pendidikan desa tidak cukup hanya membangun sekolah, tetapi harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Rasjid et al. (2024) menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan berbasis komunitas (community-based education), di mana warga dilibatkan secara aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan lokal.

Selain itu, perlu ada integrasi program antara sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan teknologi.

Kemendikbudristek (2023) dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2020–2024 menyebutkan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk menjangkau daerah 3T, namun implementasinya di tingkat mikro belum terwujud nyata di desa seperti Bantan Air.

Rosmana et al. (2022) bahkan menekankan bahwa tanpa adanya roadmap pendidikan berkelanjutan untuk desa, program-program pendidikan hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Karena itu, perbaikan akses pendidikan di Bantan Air harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta secara simultan dan berkelanjutan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Desa Bantan Air bukanlah sekadar permasalahan teknis, tetapi mencerminkan persoalan struktural, sosial, dan kebijakan yang saling berkelindan. Diperlukan keberpihakan kebijakan yang konkret dan komprehensif untuk mencegah terjadinya generasi yang tertinggal secara permanen. Pendidikan harus didekati tidak hanya sebagai sektor, tetapi sebagai jantung pembangunan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa akses pendidikan di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, masih menghadapi berbagai tantangan serius yang bersifat struktural dan multidimensional. Kerusakan infrastruktur jalan, tidak tersedianya transportasi umum, serta keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas,

perpustakaan, laboratorium, dan perangkat teknologi menjadi penghambat utama proses belajar-mengajar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap semangat belajar siswa, partisipasi pendidikan, serta ketimpangan mutu pendidikan dibanding wilayah perkotaan.

Faktor sosial ekonomi turut memperparah permasalahan akses pendidikan. Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dan pendapatan rendah, biaya pendidikan—termasuk transportasi dan perlengkapan belajar—menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, sebagaimana tercermin dalam keterlibatan mereka dalam program literasi dan pelatihan pemberdayaan ekonomi.

Temuan ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan implementasi kebijakan daerah. Meskipun pendidikan telah menjadi bagian dari agenda perencanaan pembangunan desa, realisasi di lapangan belum memadai dan belum menyentuh kebutuhan paling mendesak. Ketimpangan kebijakan ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan rendahnya kapasitas implementasi dalam sistem pendidikan desentralistik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan di Desa Bantan Air tidak bisa dipisahkan dari dinamika kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, dan keterbatasan tata kelola daerah. Upaya perbaikan harus mempertimbangkan konteks lokal secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., & Salam, S. (2019). Faktor- faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. *CORCYS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(2), 57–65. <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/1137>
- Amir, T., Rahmawati, D., & Sudrajat, M. (2020). Tantangan pendidikan di daerah terpencil: Studi empiris di Indonesia. *CORCYS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(1), 20–27. <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/1137>
- Annisa, M. A., Sulistyorini, R., & Purba, A. (2024). Strategi penataan kawasan pendidikan kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 3(2), 87–95. <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige/article/view/2705>
- Baihaki, M. V., et al. (2024). Meningkatkan akses transportasi untuk pendidikan di pedesaan. *Wahana Pendidikan*, 8(2), 89–98.
- Berliana, N., Hamidah, N. I. F., & Jasmi, R. A. (2024). Tantangan dan solusi pendidikan di daerah terpencil: Studi kasus di Desa Cisampang. *Jurnal Prestise Pendidikan*, 2(1), 33–42. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/prestise/article/view/38655>
- Fardila, A., et al. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya untuk pendidikan di daerah 3T. *Journal on Education*, 6(1), 45–60.
- Kapile, C., & Aras, R. (2019). Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dasar di Desa Ngovi. *JURPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 16(1), 1–15.
- Kemendikbudristek. (2023). Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Luthfia, A. N., Wahiddiyah, N. P., & Safitri, D. (2023). Analisis problematika pendidikan Indonesia di wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 112–120.
- Mustawaniyah, M. (2023). Desentralisasi dan akses pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(2), 123–134. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1093>
- Radja, I. G. S., Sunjaya, L. R., & Febriansyah, Y. E. W. (2023). Kualitas pendidikan di daerah pedesaan: Studi kasus Desa Rowotamtu dan Tisnogambar. *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 88–102.
- Rahma, S. F., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh infrastruktur transportasi dan teknologi informasi

- terhadap ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan ISEI*, 4(1), 56–67.
<https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/453>
- Rasjid, A. R., et al. (2024). Tantangan dan prospek pendidikan masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembangunan*, 3(1), 11–21.
- Rosmana, P. S., et al. (2022). Upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 405–418.
- Shakira, B. O., Ramadhani, N. A., & Salma, Z. H. (2024). Analisis infrastruktur jalan dan pendidikan sebagai tantangan demokrasi dan tata kelola. *Jurnal Terang*, 1(4), 218–234.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/642>